

ISSN : 1978-0362

JURNAL SOSIOLOGI REFLEKTIF



Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGELOLA JURNAL

Ketua Penyunting/Editor-in-Chief:

Achmad Zainal Arifin (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Sekretaris Penyunting/Managing Editor:

Muryanti (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Penyunting Pelaksana/Editors:

Achmad Norma Permata (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Firdaus Wajdi (Universitas Negeri Jakarta)

Napsiah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Yayan Suryana (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Astri Hanjarwati (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Sulistyaningsih (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Rilus A. Kinseng (FEMA Institut Pertanian Bogor)

Sekretariat/Secretary:

Novia Tensiani (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Mitra Bestari/Editorial Board:

Alix Philippon (Sciences Po Aix France)

M. Nur Ichwan (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Zuly Qadir (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Syarifudin Jurdi (UIN Alauddin Makassar)

Gregory Vanderbilt (Eastern Mennonite University United States)

Diterbitkan oleh:

Laboratorium Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Redaksi:

Laboratorium Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto No.1, Yogyakarta

Telp (0274) 51957; Fax. (0274) 519571

Email:

sosiologirefleksif@uin-suka.ac.id dan

sosiologirefleksif@gmail.com

Jurnal Sosiologi Reflektif (JSR) adalah jurnal ilmiah berkala yang memfokuskan diri pada hasil penelitian terkait isu-isu sosial-keagamaan di masyarakat Muslim, khususnya yang berkenaan dengan upaya penguatan civil society dari berbagai aspeknya. Selain itu, JSR juga menerima artikel yang bersumber pada telaah pustaka terkait dengan upaya pengembangan teori-teori sosiologi yang terintegrasi dengan studi keislaman, seperti: pengembangan wacana tentang Ilmu Sosial Profetik, Islam Transformatif, atau pendekatan-pendekatan lainnya.

JSR focuses on disseminating researches on social and religious issues within Muslim community, especially related to issue of strengthening civil society in its various aspects. Besides, JSR also receive an article based on a library research, which aims to develop integrated sociological theories with Islamic studies, such as a discourse on Prophetic Social Science, Transformative Islam, and other perspectives.

JURNAL SOSIOLOGI REFLEKTIF

DAFTAR ISI

THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON INDONESIAN MUSLIM WOMEN'S CONSUMPTION OF ISLAMIC FASHION <i>Durrotul Mas'udah</i>	179
AKTIVISME, FILANTROPI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI YOGYAKARTA : Studi terhadap Dinamika Aktivisme Yayasan Sahabat Ibu dalam Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta <i>Ahmad Arif Widiyanto</i>	193
RADIKALISASI GERAKAN JAMAAH ANSHARUT TAUHID DAN PENGARUH ISIS DI INDONESIA <i>Asman Abdullah</i>	213
EKSISTENSI PUBLIC SPHERE DALAM MEDIA MAINSTREAM: Studi pada Rubrik <i>Citizen Journalism</i> Tribun Yogyakarta <i>Yanti Dwi Astuti</i>	233
KONFLIK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DI DESA SUNGSANG KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN <i>Yunindyawati¹, Evalidya¹, Yusnaini¹, Rohim Pahrozi²</i>	251
PERAN AKTOR DALAM SOSIOLOGI PEMBANGUNAN: Analisis Pergub D.I. Yogyakarta No. 16 Tahun 2017 tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja <i>Mohammad Wildan Azmi</i>	267

**STRATEGI BERJARINGAN RADIO KOMUNITAS ISLAM
MADU FM TULUNGAGUNG**
Redi Panuju 289

**MASYARAKAT BADUY DALAM PERGULATAN TIGA
JARINGAN MAKNA**
Efa Ida Amaliyah 313

**TRANSFORMASI KESETARAAN BURUH:
Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls**
Mohammad Takdir 327

**MENETAS JALAN BARU PENGEMBANGAN MASYARAKAT:
Sebuah Jawaban di Era Milenium**
Suraji, Muhammad Ali Embi 353

**PEMBANGUNAN SEBAGAI KEBEBASAN
DAN PENCAPAIAN PERUBAHAN SOSIAL**
Amril Maryolo Ar..... 367

**PERGESERAN NORMA SOSIAL PADA REMAJA DI KOTA
TANJUNGPINANG**
Endri Bagus Prastiyo..... 381

**PARTISIPASI KOMUNITAS MUSLIM DESA DALAM
USAHA PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DI INDONESIA**
Heru Dian 395

LITERATUR KEISLAMAN GENERASI MILENIAL
Syaifuddin Sholeh TS 413

PENGANTAR REDAKSI

Assalamualaikum wr. wb.

Jurnal Sosiologi Reflektif Volume 12 Nomor 2, April 2018 ini mengkaji permasalahan sosial yang kompleks dalam perspektif sosiologis. Kajian yang diketengahkan mencakup persoalan konflik nelayan, eksistensi ruang publik dalam media massa, kajian perempuan dan problem masyarakat sehari-hari, termasuk nelayan, organisasi sosial dan keagamaan.

Durrotul menulis tentang *The Impact Of Social Media On Indonesian Muslim Women's Consumption Of Islamic Fashion*. Tulisan ini memaparkan analisis tentang media sosial sebagai sebuah alat konsumsi baru dan pengaruhnya terhadap pola konsumsi fashion Islami oleh wanita Muslim di Indonesia. Hasil analisis menyimpulkan bahwa media sosial, yang dapat dilihat sebagai sebuah alat konsumsi baru, mempengaruhi pola konsumsi fashion Islami oleh wanita Muslim di Indonesia dalam dua cara yang saling berhubungan: (1). media sosial menjadi sebuah ruang konstruksi berbagai macam standar yang dianggap ideal tentang penampilan wanita Muslim yang fashionable dan (2). media sosial mempengaruhi cara-cara wanita Muslim di Indonesia dalam mengkonstruksi dan mempresentasikan identitasnya sebagai wanita Muslim yang fashionable. Kedua hal ini membentuk pola konsumsi mereka terhadap fashion Islami.

Ahmad Arif Widiyanto menulis tentang *Aktivisme, Filantropi Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Di Yogyakarta : Studi terhadap Dinamika Aktivisme Yayasan Sahabat Ibu dalam Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta*. Penulis menjelaskan artikel ini membahas dinamika aktivisme perempuan Yayasan Sahabat Ibu (YSI) dalam melakukan pemberdayaan perempuan di Yogyakarta. Awalnya YSI terbentuk dari perempuan-perempuan aktivis yang tergerak untuk melakukan *recovery* terhadap anak-anak dan perempuan pasca gempa bumi di Yogyakarta melalui kegiatan filantropis dan motivasi. Aktivisme mereka berlanjut seiring beruntunnya bencana alam di Yogyakarta dari tahun 2006-2012. Para aktivis tersebut kemudian mendeklarasikan diri sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dalam tulisan ini, Dinamika YSI dibahas dalam tiga poin; *pertama*, potret aktivisme perempuan dan filantropi di Indonesia. *Kedua*, dinamika aktivisme YSI dari karitatif menuju pemberdayaan produktif. *Ketiga*, Upaya YSI untuk melepaskan diri dari ketergantungan bantuan filantropi atau *fundraising* dari lembaga donor melalui pengembangan ekonomi produktif dan pembentukan koperasi simpan pinjam.

Asman Abdullah menulis tentang Radikalisasi Gerakan Jamaah Ansharut Tauhid dan Pengaruh Isis di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi kasus yang menyorot gerakan Jamaah Anshorut Tauhid. Gerakan JAT merupakan gerakan jihad dengan tujuan memperjuangkan Syariat Islam di Indonesia. Dua hal yang patut disorot dari gerakan JAT *pertama*, keterlibatan JAT dalam pelatihan militer Aceh tahun 2010. Pelatihan militer ini melibatkan lintas *tanzhim* jihad di Indonesia. Alumni dari pelatihan ini kelak membentuk jaringan radikal baru yang berafiliasi dengan ISIS. *Kedua*, pengaruh ISIS di Indonesia melahirkan perpecahan bagi JAT. Bagi jihadi JAT yang mendukung ISIS tetap bertahan dibawah pimpinan Abu Bakar Ba'asyir dan Aman Abdurrahman sedangkan yang menolak bergabung dengan ISIS harus keluar dari *tanzhim*. *Ketiga*, mereka yang keluar dari JAT membentuk jamaah baru dengan nama Jamaah Anshorut Syariah (JAS) dibawah pimpinan Muhammad Achwan.

Yanti Dwi Astuti menulis tentang Eksistensi *Public Sphere* dalam Media Mainstream: Studi pada Rubrik Citizen Journalism Tribun Yogyakarta. Fenomena *Citizen Journalism* menjadi trend dalam dunia jurnalisme dan menjadi ruang publik baru bagi masyarakat. Salah satu media mainstream yaitu koran Tribun Jogja mengadopsi tren tersebut ke dalam rubriknya yang dinamakan rubrik Citizen journalism. Namun dalam prakteknya, terdapat banyak sekali kecenderungan pemberitaan yang tidak sesuai dengan makna hakiki dari *citizen journalism* dan ruang publik itu sendiri. Dimana cenderung sangat datar dan deskriptif tidak menyentuh pada esensi dari makna ruang publik yaitu pada proses diskusi yang megedepankan debat rasional dan kritis serta masih diberlakukannya proses penyeleksian dan editing oleh redaktornya. Hal ini sangat kontras dengan semangat hadirnya *citizen journalism* yang bersifat bebas dari intervensi siapapun, menyuarakan pendapat secara leluasa, interaktifitas, tidak terbatas oleh halaman (*unlimited space*), tidak ada persaingan antar penulis, dan tidak adanya penyeleksian ketat terhadap konten beritanya.

Yunindyawati, Evalidya, Yusnaini dan Rohim Pahrozi menulis tentang Konflik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Desa Sungsang

Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Dalam masyarakat pesisir, konflik adalah salah satu gejala sosial yang sering kita jumpai di sekitaran daerah mayoritas nelayan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik sosial yang terjadi antara lain konflik karena penggunaan alat tangkap yang merugikan, tumpang tindih lokasi penangkapan, pengrusakan alat tangkap dan kenakalan remaja. Penyelesaian konflik melibatkan berbagai pihak. Jika secara musyawarah mufakat tidak bisa menyelesaikan masalah, maka akan dilanjutkan dengan mediasi oleh pihak pemerintah desa. Langkah selanjutnya yang ditempuh jika mediasi tidak berhasil maka berlanjut ke pihak berwenang seperti dinas terkait dan bahkan kepolisian.

Wildan Azmi menulis tentang Peran Aktor dalam Sosiologi Pembangunan: Analisis Pergub D.I. Yogyakarta No. 16 Tahun 2017 tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja. Artikel ini menjelaskan peran aktor kebijakan dalam sosiologi pembangunan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. PERGUB D.I. Yogyakarta No. 16 Tahun 2017 tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja adalah upaya pemerintah sebagai aktor dalam meningkatkan pelayanan publik melalui sektor transportasi publik (Bus Trans Jogja). Hasil penelitian menunjukan bahwa pembangunan bukan sekedar dari sektor ekonomi dan politik saja, melainkan sektor sosial juga memiliki peran penting dalam pembangunan mewujudkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian aktor kebijakan dalam sosiologi pembangunan dari sektor transportasi publik (Bus Trans Jogja) memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Redi Panuju menulis tentang Strategi Berjaringan Radio Komunitas Islam Madu Fm Tulungagung. Fenomena radio komunitas Madu FM sangat menarik untuk diteliti karena merupakan stasiun radio komunitas yang berhasil tumbuh di tengah penyiaran kontestasi. Radio komunitas mendapat pembatasan pembatasan (pembatasan) negara melalui Undang-Undang Penyiaran (UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran). Selain itu, radio komunitas masih harus bersaing dengan radio swasta dan televisi swasta. Madu FM mampu beradaptasi dengan keadaan tanpa melanggar peraturan. Hasilnya adalah strategi penyiaran radio komunitas berhasil berinovasi inovasi sehingga menjadi ada. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam. Penelitian dilakukan selama periode dari bulan Maret sampai Agustus 2016.

Efa Ida Amaliyah menulis tentang Masyarakat Baduy dalam

Pergulatan Tiga Jaringan Makna. Tujuan tulisan ini mengeksplorasi tentang tiga jaringan makna yang menjadi teori Bernard Adeney-Risakotta, yaitu agama, modernitas, dan budaya nenek moyang pada masyarakat Baduy yang mempunyai pola sedikit berbeda. karena ada dua Baduy, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Luar sudah terpengaruh pada modernitas, yaitu teknologi (televisi dan transportasi), institusi dan gagasan (ide). Tidak ada konfrontasi dari luar Baduy, karena mengedepankan kebersamaan dan saling menghormati. Baduy Luar masih memegang teguh budaya nenek moyang dengan patuh pada puun sebagai kepala suku. Mereka tetap memakai identitas sebagai masyarakat Baduy, yaitu pakaian yang merupakan ciri khas Baduy. Baduy Dalam dalam menerima tiga jaringan di atas. Baduy Dalam merupakan masyarakat yang menonjolkan budaya nenek moyang.

Mohammad Takdir menulis tentang Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls. Artikel ini bertujuan untuk mengubah paradigma tentang buruh yang selalu dipandang sebagai sekelompok masyarakat yang terbelakang dan tertindas. Dalam memandang relasi buruh dan majikan, sebagian orang seringkali menggunakan paradigma perbudakan daripada paradigma kemanusiaan (*humanitarian paradigm*). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam sebuah struktur sosial masyarakat lebih diakibatkan oleh hilangnya rasa empati yang mendalam terkait dengan argumen kesetaraan (*equality*) sebagai kata kunci dalam konsepsi keadilan. Rawls menawarkan konsep tentang *justice as fairness* yang harus menjadi pijakan utama dalam memperjuangkan kesetaraan buruh dalam berbagai aspek, terutama menyangkut pemenuhan hak, kewajiban dan kesejahteraan hidup.

Suraji, Muhammad Ali Embi menulis tentang Menetas Jalan Baru Pengembangan Masyarakat: Sebuah Jawaban di Era Mellineum. Pengembangan masyarakat proses bergerak ke arah suatu tahap atau kondisi di mana masyarakat menjadi semakin kompeten terhadap permasalahan dan kondisi komunitas maupun lingkungannya. Kompetensi masyarakat yang semakin meningkat ini diharapkan dapat menimbulkan aktivitas pembangunan atas prakarsa masyarakat (komunitas) sendiri. Pengembangan masyarakat juga sebagai gerakan, yang berusaha melakukan reformasi terhadap kondisi yang dianggap kurang menguntungkan. Dalam konteks saat ini tentu pengembangan masyarakat (*community development*) didasarkan pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan masyarakat lokal menuju kemajuan dan

kesempurnaan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul di era globalisasi. Kajian yang relevan dalam community development adalah kajian pengembangan masyarakat yang sejalan dengan peran lembaga Perguruan Tinggi yaitu memfungsikan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Amril Maryolo menulis tentang Pembangunan Sebagai Kebebasan dan Pencapaian Perubahan Sosial. Kajian sosial memiliki macam variasi karena masyarakat bukanlah objek yang tunggal. Perubahan sosial merupakan fenomena konstruksi masyarakat yang memiliki ragam yang bervariasi. Pembangunan merupakan suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, sosial, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu “pembangunan” disejajarkan dengan kata “perubahan sosial”. Bersamaan dengan teori pembangunan terdapat teori-teori perubahan sosial lainnya seperti sosialisme, dependensia, ataupun teori lain.

Endri Bagus Prastiyo menulis tentang Pergeseran Norma Sosial Pada Remaja di Kota Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau yang saat ini sedang berkembang, namun memiliki berbagai masalah terkait dengan pergeseran nilai yang terjadi pada generasi mudanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran norma sosial dikalangan remaja Kota Tanjungpinang dimana mereka telah banyak melakukan pelanggaran norma sosial yang ada di masyarakat, mulai dari adanya remaja yang mengkosumsi minuman berakohol, menggunakan narkoba, bahkan melakukan seks bebas. Perilaku ini terjadi karna ada faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran norma itu terjadi, yaitu faktor secara internal dan eksternal, internal berasal dari dalam diri remaja itu sendiri, sementara eksternal merupakan faktor yang didapat dari luar diri remaja.

Heru Dian menulis tentang Partisipasi Komunitas Muslim Desa dalam Usaha Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. Terbentuknya BUMDes sebagaimana tertuang dalam UU No.6/2014 belum sepenuhnya mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan, karena hanya sekitar 9,09% desa yang dinilai mampu merealisasikan program BUMDes, bahkan dari jumlah prosentase tersebut hanya terdapat sekitar 21,68% BUMDes yang dinilai menguntungkan. Banyak faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pembangunan program BUMDes. Satu faktor paling penting adalah kurangnya pengembangan modal sosial di pedesaan.

Demikian kajian Jurnal Sosiologi Reflektif Edisi 12 Nomor 2. Semoga artikel yang penulis sajikan memberikan pengetahuan baru dan bermanfaat bagi pembaca yang budiman.

Wallahu a'lam bi showab

Wassalamualaikum wr.wb

**JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF**



KONFLIK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DI DESA SUNGSANG KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN

Yunindyawati¹, Evalidya¹, Yusnaini¹, Rohim Pahrozi²

¹Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya

²Peneliti Poltracking Wilayah Sumatera Selatan

Alamat Email: yunin.unsri@gmail.com

Abstract

Within the coastal communities, a conflict is one of a popular feature of society that we can easily found. This research discusses and dig about the factors of conflict and how the fisherman resolve the conflict. This research employs a qualitative procedurs. Data collection methode used for this research are: participant observation, in-depth interviews, literature and documentation study. Data analysis was conducted by applying some steps, such as: identification, classification, interpretation and conclusions. The result indicates that social conflict is in part caused by the catching fish methods that are not mutually beneficial, overlapping the areas, destruction of a catch and other misbehavior attitudes, especially teenager. On conflict resolution in Sungsang village, it various parties also involved. If it is solved by deliberation consensus interpersonal, so it will continue with mediation by the village government. If it is not solved, it can be continues to the authorities department and even to the police.

Keywords: Social Conflict, Economic Conflict, Coastal Communities

Intisari

Dalam masyarakat pesisir, konflik adalah salah satu gejala sosial yang sering kita jumpai di sekitaran daerah mayoritas nelayan. Penelitian ini membahas dan menggali tentang konflik apa saja yang terjadi dan bagaimana masyarakat nelayan itu menyelesaikan konflik yang ada. Kemudian siapa saja berperan dalam penyelesaian konflik itu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

deskriptif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi langsung ke lapangan, wawancara mendalam, kajian literatur dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan melakukan langkah-langkah antara lain: identifikasi, klasifikasi, interpretasi dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik sosial yang terjadi antara lain konflik karena penggunaan alat tangkap yang merugikan, tumpang tindih lokasi penangkapan, pengrusakan alat tangkap dan kenakalan remaja. Penyelesaian konflik melibatkan berbagai pihak. Jika secara musyawarah mufakat tidak bisa menyelesaikan masalah, maka akan dilanjutkan dengan mediasi oleh pihak pemerintah desa. Langkah selanjutnya yang ditempuh jika mediasi tidak berhasil maka berlanjut ke pihak berwenang seperti dinas terkait dan bahkan kepolisian.

Kata Kunci: Konflik Sosial, Konflik Ekonomi, Masyarakat Nelayan

Pendahuluan

Konflik merupakan salah satu yang bersifat disosiatif yang tidak selalu berarti negatif karena jika konflik yang dihadapi dengan bijaksana dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat didalamnya. Dalam masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan, konflik adalah salah satu gejala sosial yang akan sering kita temukan ketika kita berbicara tentang komunitas masyarakat di pesisir. Tidak berbeda jauh dengan masyarakat di daratan, konflik sosial dan konflik ekonomi masyarakat pesisir pun bisa dengan mudahnya kita jumpai. Konflik sosial yang terjadi bisa terjadi disebabkan karena adanya kecemburuan sosial, adanya ketergantungan yang tidak saling menguntungkan dan relasi sosial yang kurang baik. Disamping itu juga, penggunaan peralatan dan perlengkapan yang kurang canggih juga dapat memicu konflik di masyarakat nelayan. Ketidaktahuan seseorang dalam memodernisasi peralatan karena akses ekonomi yang kurang juga bisa menjadi salah satu faktor dalam terjadinya konflik.

Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial juga meningkat dibandingkan dengan masa sebelum dioperasikannya alat tangkap yang lebih modern. Sejalan dengan itu, perbedaan kapasitas teknologi serta modal, dan akses antarpengguna sumber daya perikanan

berpotensi menimbulkan konflik pengelola sumber daya. Latar belakang konflik sosial ini terjadi karena kecemburuan sosial yang dipicu oleh kenyataan bahwa salah satu pihak dapat memperoleh bagian yang terbesar dari eksploitasi sumber daya perikanan, sedangkan pihak yang lain sebaliknya. Konflik sosial yang muncul adalah manifestasi dari kesenjangan ekonomi atau kesenjangan pendapatan diantara kelompok-kelompok masyarakat nelayan.

Dengan kata lain, dalam proses produksi dominasi satu kelas itu berlaku dalam batas radius tertentu. Jarak dominasi atau areal tangkap nelayan di kalangan kaum nelayan dalam proses produksi sangat ditentukan oleh tingkat teknologi yang digunakan oleh setiap kelas nelayan itu sendiri.

Unit penangkapan dan jenis alat tangkap memegang peranan yang penting dalam analisis kelas di kalangan kaum nelayan. Selain itu jarak dominasi juga sangat penting untuk diperhatikan, jarak dominasi merupakan jarak spasial dominasi suatu kelas (kelompok) sosial atas kelas (kelompok) lainnya.

Penelitian Sulaiman (2013) tentang Model Penyelesaian Konflik Alat Tangkap Perikanan di Aceh Barat mendapati bahwa konflik yang terjadi di Lhok Meureubo dalam kaitannya dengan larangan hukum penggunaan alat tangkap *trawl*, muncul sejak tahun 2003. Konflik terjadi diawali dengan pemakaian jenis alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Pemakaian alat tangkap ini sudah sejak lama, namun setelah tsunami, pemakaian mini *trawl* semakin banyak dari berbagai bantuan untuk korban tsunami. Proses penyelesaian konflik juga sudah berlangsung sejak 2003, ketika pada saat itu ada sekelompok nelayan yang meminta komitmen pemerintah kabupaten untuk menertibkan pemakaian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Namun pada waktu itu, permintaan tersebut tidak berlangsung maksimal. Baru setelah tsunami melalui berbagai tekanan yang dilakukan nelayan, akhirnya pemerintah tegas terhadap pengguna *trawl*. Bupati membentuk tim terpadu dan tim teknis yang melakukan razia dan penegakan hukum. Langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mengantisipasi penggunaan *trawl* di masa mendatang, terutama dengan menggantikan alat tangkap *trawl* dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Nelayan yang menggunakan *trawl* yang sudah mendaftarkan boatnya, kemudian melaporkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat untuk mendapatkan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Seperti yang diungkapkan oleh Widiarto, Setiawan dan Faizin

(2013) dalam penelitiannya tentang Mekanisme Penyelesaian Konflik Nelayan. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa konflik yang terjadi di masyarakat nelayan berbentuk horizontal dan vertikal dengan sifat konflik berupa konflik laten dan manifest. Mekanisme penyelesaian konflik di masyarakat nelayan sangat dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang hidup di dalamnya. Yakni norma agama/kepercayaan dan norma kesusilaan. Norma tersebut berasal dari keyakinan/ kepercayaan masyarakat maupun norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat setempat. Berdasarkan dari beberapa penelitian yang diungkapkan diatas, bisa kita lihat bahwa konflik yang terjadi di masyarakat nelayan lebih kepada konflik horizontal dan vertikal. Dimana konflik horizontal lebih kepada konflik antar nelayan itu sendiri. Konflik vertikal lebih disebabkan karena adanya hubungan yang kurang baik dengan pemangku kepentingan seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI), aparat pemerintah, maupun aparat keamanan. Konflik di dalam masyarakat memang tidak akan bisa dihilangkan. Tetapi, dengan tidak bisa menghilangkan konflik dalam kehidupan sosial, bukan berarti individu atau kelompok harus menciptakan konflik agar tetap ada. Konflik harus diselesaikan apapun bentuknya dan sekecil apapun intensitasnya.

Di Desa Sungsang sendiri, konflik-konflik seperti diatas juga tidak bisa dihindarkan. Baik konflik horizontal maupun monflik vertikal. Konflik horizontal pernah terjadi juga di tahun 1996, sebanyak 6 buah kapal *trawl* dibakar oleh massa nelayan Sungsang. Kapal tersebut merupakan kapal dengan muatan sebanyak 20-30 ton. *Trawl* bagi masyarakat nelayan di Desa Sungsang sangat mengganggu. Baik mengganggu ekosistem laut maupun mengganggu penghasilan masyarakat nelayan yang ada. Disamping itu juga, *trawl* ini sering merusak alat tangkap nelayan lainnya jika tertabarak oleh kapal *trawl* tersebut.

Pengoprasian pukat harimau atau jaring *trawl* telah dilarang pengoperasiannya berdasarkan Kepres No. 39 Tahun 1980 dengan alasan timbulnya keresahan sosial akibat terjadinya bentrokan fisik antara nelayan tradisional dan nelayan *trawl* yang beroperasi pada wilayah penangkapan yang sama di beberapa perairan pantai. Selain itu, penggunaan jaring *trawl* mengakibatkan juga kerusakan sumberdaya ikan pantai karena selektivitas jaring *trawl* yang rendah, sehingga menghasilkan tangkap sampingan (*bycatch*) dalam jumlah besar. Meski demikian, karena *trawl* merupakan satusatunya alat tangkap yang paling efektif untuk menangkap

udang dan karena lemahnya pengawasan dan tindakan hukum (*law enforcement*) yang dikenakan setiap pelanggarnya, hal ini telah mendorong nelayan untuk tetap mengoperasikan jaring *trawl* di sebagian besar wilayah perairan pantai yang kaya dengan udang. Memang tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa, dalam mempertahankan keberlangsungan ekonominya nelayan justru menggunakan metode-metode penangkapan yang jelas-jelas sudah dilarang oleh pemerintah. Karena memang berdampak buruk bagi keberlangsungan ekosistem di sekitar. Sehingga akan berpengaruh juga pada keberlangsungan ekonomi nelayan itu sendiri di masa depannya.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana sejauh ini konflik yang terjadi pada nelayan di pesisir Sungsang dan sejauhmana langkah-langkah yang mereka ambil dalam menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi. Data yang diperoleh dalam tulisan ini bersumber dari hasil penelitian yang dilakukan pada bulan september 2017 di Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Desa Sungsang merupakan salah satu desa nelayan yang ada di Sumatera Selatan. Desa-desa di wilayah Sumatera Selatan mayoritas tidak berbatasan dengan laut, sehingga tidak banyak ditemukan desa nelayan disana. Pemilihan sampel informan dilakukan secara nonprobabilita, yakni secara purposif atau dipilih secara sengaja.

Konflik Nelayan

Konflik dalam masyarakat nelayan terjadi di laut karena kita ketahui bersama bahwa laut merupakan ruang publik yang setiap orang bisa memakai dan menggunakannya. Tidak ada batasan tertentu seperti di daratan bahwa tanah ini milik pribadi tertentu dan orang lain dilarang mempergunakannya tanpa seizin dari orang yang punya. Konflik nelayan terjadi karena adanya ketidakserasian antar nelayan. Baik itu ketidakserasian dalam bidang area tangkapan, penggunaan alat tangkap maupun yang lainnya.

Charles (2001), membedakan konflik yang muncul terkait dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan menjadi 4 (empat) tipologi berdasarkan ruang lingkup atau aspek-aspeknya, yaitu sebagai berikut:

1. *Fishery jurisdiction*, yaitu konflik yang terjadi pada tingkat kebijakan dan perencanaan, seperti konflik antar instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
2. *Management mechanism*, yaitu konflik yang terjadi pada

tingkat pengelolaan dari perencanaan hingga penegakan hukum.

3. *Internal allocation*, yaitu konflik yang muncul sesama pengguna sumberdaya, misalnya antara nelayan dengan pengusaha processing.
4. *External allocation*, yaitu konflik yang terjadi antara nelayan dengan pelaku lain, seperti pembudidaya ikan, nelayan asing, atau pertambangan dan lain sebagainya.

Sedangkan Satria (2006) konflik kenelayanan mengidentifikasi berdasarkan penyebabnya yang muncul terkait pemanfaatan sumberdaya perikanan, menjadi 7 (tujuh) tipologi konflik antara lain sebagai berikut:

1. Konflik kelas, adalah konflik yang terjadi antar kelas sosial nelayan dalam memperebutkan wilayah penangkapan (fishing ground). Konflik kelas terjadi sebagai akibat adanya kesenjangan teknologi penangkapan ikan. Konflik bisa terjadi antara nelayan tradisional dengan nelayan modern.
2. Konflik kepemilikan sumberdaya, adalah konflik yang terjadi sebagai akibat dari isu kepemilikan sumberdaya, dimana kepemilikan laut serta ikan tidak dapat terdefinisi secara jelas milik siapa. Konflik bisa terjadi antara nelayan tradisional dengan sesama nelayan baik nelayan tradisional ataupun nelayan modern, nelayan dengan pembudidaya ikan, nelayan dengan pelaku pariwisata bahari, nelayan dengan industri pertambangan maupun nelayan dengan pemerintah. Misalnya kasus konflik yang terjadi pada Industri Mutiara dengan nelayan di Lombok.
3. Konflik pengelolaan sumberdaya, adalah konflik yang terjadi akibat "pelanggaran aturan pengelolaan" serta adanya isu-isu tentang siapa yang berhak mengelola sumberdaya perikanan atau sumberdaya laut. Konflik bisa terjadi antara nelayan tradisional dengan sesama nelayan ataupun nelayan tradisional dengan pemerintah.
4. Konflik cara produksi/alat tangkap, adalah konflik yang terjadi akibat perbedaan penggunaan alat tangkap. Konflik bisa terjadi antara sesama nelayan tradisional maupun nelayan tradisional dengan nelayan modern yang merugikan salah satu pihak yang berkonflik.
5. Konflik lingkungan, adalah konflik yang terjadi akibat kerusakan lingkungan karena praktek satu pihak yang merugi-

kan nelayan lain. Konflik bisa terjadi antara nelayan tradisional dengan nelayan pengebom (nelayan yang menggunakan bom dalam kegiatan penangkapan ikan), dan terjadi antara nelayan tradisional dengan nelayan penambang.

6. Konflik usaha, adalah konflik yang terjadi di darat sebagai akibat mekanisme harga maupun sistem bagi hasil yang merugikan sekelompok nelayan. Konflik bisa terjadi antara nelayan tradisional dengan sesama nelayan, pengolah ikan, pedagang ikan, maupun dengan pemilik kapal.
7. Konflik primordial, adalah konflik yang terjadi akibat perbedaan ikatan primordial/identitas (ras, etnik, dan asal daerah). Konflik biasanya terjadi antara nelayan tradisional dengan nelayan pendatang.

Menurut Fisher (2001) perlu menggambarkan tipe-tipe konflik yang akan menuntun ke berbagai bentuk kemungkinan intervensi, sifat-sifat konflik yang memiliki potensi dan tantangan sendiri. Sifat konflik yang diajukan oleh Fisher yaitu:

1. Tanpa Konflik, kesan umumnya baik. Dalam kehidupan yang bersifat dinamis, memanfaatkan konflik perilaku tujuan serta mengelola konflik secara kreatif.
2. Konflik Laten, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif.
3. Konflik Terbuka, berakar dalam dan sangat nyata. Memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.
4. Konflik di Permukaan, memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran dimana dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi

Pandangan Karl Marx terhadap Konflik

Konflik menurut Karl Marx merupakan pertentangan antara kelas borjuis melawan kelas proletar yang memperebutkan sumber-sumber ekonomi (alat-alat produksi). Karl Marx menjelaskan bahwa masyarakat pada abad ke-19 di Eropa terbagi menjadi 2 kelas sosial yakni Borjuis dan Proletar. Kelas borjuis merupakan nama khusus untuk para kapitalis dalam ekonomi modern. Mereka memiliki alat-alat produksi dan memperkerjakan pekerja upahan. Konflik antar

kelas borjuis dan proletar adalah contoh lain dari kontradiksi material yang sebenarnya. Kontradiksi ini berkembang sampai menjadi kontradiksi antara kerja dan kapitalisme. Sedangkan Kelas Proletariat merupakan para pekerja yang menjual kerja mereka dan tidak memiliki alat-alat produksi sendiri. Mereka tidak memiliki sarana-sarana sendiri dan pabrik, tetapi Marx kemudian percaya bahwa proletariat bahkan kehilangan keterampilan mereka, karena proletariat hanya memproduksi demi pertukaran, maka mereka juga konsumen. Mereka tidak memiliki sarana-sarana untuk memproduksi kebutuhan mereka sendiri, maka mereka harus menggunakan upah yang mereka peroleh untuk membeli apa yang mereka butuhkan. Maka dari itu, proletariat tergantung sepenuhnya pada upahnya untuk bertahan hidup.

Pada sistem produksi kapitalis kelas kedua tersebut saling ketergantungan, namun tidak seimbang. Kelas proletar tidak dapat hidup jika tidak bekerja. Sedangkan kelas borjuis meskipun pabriknya tidak berjalan, ia masih dapat bertahan dari modal yang dikumpulkannya selama pabriknya bekerja yakni dengan menjual pabriknya. Dengan demikian kelas borjuis adalah kelas yang kuat, sedangkan kelas proletar adalah kelas yang lemah. Kedua kelas ini berada dalam suatu struktur sosial hirarkis, kaum borjuis melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar dalam proses produksi. Dan memiliki alat-alat produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Marx juga menjelaskan bahwa seluruh keteraturan dalam masyarakat proletar disebabkan adanya pemaksaan oleh para penguasa.

Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumberdaya pesisir. Mata pencaharian masyarakat pesisir biasanya memanfaatkan sektor sumberdaya laut seperti nelayan, pembudidaya ikan dan hasil laut lainnya serta transportasi laut.

Ditinjau dari sosiologis, masyarakat pesisir ataupun masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan setidaknya mempunyai sistem yang khas dalam struktur sosialnya. Hubungan patron dan klien dalam kehidupannya sehari-hari terasa sekali. Tetapi, dari hubungan patron dan klien ini juga lah sering timbulnya konflik di lingkungan

sosial tersebut. Teutama tentang hutang piutang yang terjadi antara patron dan klien.

Pemetaan Konflik Sosial Nelayan

Konflik sosial ekonomi di kalangan masyarakat nelayan di Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan seringkali terjadi. Konflik-konflik yang terjadi akan diuraikan dibawah ini.

1. Jenis konflik

a. Mengenai Penggunaan Alat Tangkap

Konflik yang pernah terjadi dan sampai saat ini masih terus terjadi adalah konflik terkait penggunaan alat tangkap *trawl* (pukat hariamau) oleh beberapa nelayan, baik itu nelayan dari luar Desa Sungsang maupun nelayan yang juga berasal dari Sungsang. Sekitar tahun 2004 pernah terjadi insiden pembakaran kapal nelayan yang menggunakan *trawl*. Disinyalir kapal tersebut berasal dari Tungkal Jambi. Tetapi setelah itu tidak ada lagi tindakan tegas dari para aparat penegak hukum di Sungsang. Padahal *trawl* ini sangat mengganggu. Terutama bagi nelayan pancing, karena dapat memutuskan tali pancing yang sedang dipasang nelayan. Biasanya kapal yang digunakan nelayan *trawl* berupa kapal yang relatif kecil dengan kapasitas mesin cukup besar.

Nelayan berharap agar adanya tindakan tegas dari para penegak hukum. Mereka sangat berharap pemerintah pusat mendengar keluhan mereka. Kepercayaan mereka kepada para penegak hukum di daerah saat ini cukup rendah. Ada dugaan para penegak hukum di daerah sudah mendapat gratifikasi dari para pelaku sehingga seolah-olah tutup mata dengan keadaan ini. Diduga para pelaku memberikan gratifikasi sebesar satu juta rupiah kepada para penegak hukum yang ada di Sungsang.

b. Tumpang Tindih Lokasi Penangkapan Ikan

Konflik antar nelayan yang pernah terjadi juga tentang tumpang tindih alat tangkap ikan. Karena terlalu luasnya wilayah tangkapan yang digunakan oleh nelayan. Sementara alat penanda bahwa wilayah itu sudah dipasang alat tangkap oleh nelayan lainnya minim, sehingga nelayan lain tidak tahu kalau disana sudah ada alat tangkap nelayan lainnya.

Misalnya nelayan yang menggunakan alat tangkap pancing rawai. Banyaknya mata pancing bisa mencapai 3000 mata pancing dengan panjang sekitar 5,5 mil. Antara satu mata pancing dengan

mata pancing lainnya sekitar 2 depa orang dewasa atau sekitar 2,5 - 3 meter.

c. Tabrakan Kapal Nelayan

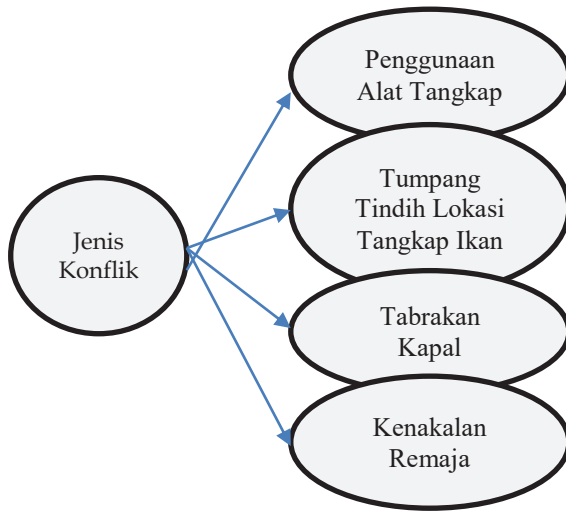
Di setiap tempat tentu tidak lepas dengan yang namanya konflik. Untuk di Sungsang, konflik yang pernah terjadi yang memang setiap tahunnya terjadi minimal satu kali yaitu kapal nelayan ditabrak oleh kapal tongkang, yang biasanya selalu terjadi pada malam hari. Konflik seperti ini selalu menjadi kekhawatiran nelayan di Sungsang pada saat melaut di malam hari, dimana hal tersebut berhubungan dengan keselamatan nyawa. Kejadian ditabrak kapal tongkang dapat menyebabkan kapal mereka patah atau tertimpa kapal yang berujung pada tenggelamnya kapal dan seluruh isinya. Tidak jarang kejadian seperti ini menelan korban jiwa.

Jika nasib nelayan tersebut baik maka nelayan tersebut bisa selamat dari maut karena tabrakan atau tenggelam. Jika kapal tersebut bisa dikejar dan ditangkap atau dilaporkan, kapal yang tertangkap tersebut dapat memberikan ganti rugi ke nelayan yang ditabrak tersebut dengan prosedur pengajuan ganti rugi yang panjang. Kalau untuk jumlah ganti rugi yang diberikan biasanya hal tersebut disesuaikan dengan ukuran kapal dan lainnya. Kejadian tersebut masih menjadi konflik yang setiap tahun selalu terjadi. Terkadang kapal yang ditabrak tidak diberi ganti rugi oleh kapal penabrak yang menyebabkan nelayan tersebut mengalami kerugian bisa sampai Rp 100.000.000,- untuk satu kapal yang ditabrak.

d. Kenakalan Remaja

Dalam masyarakat nelayan seperti di pesisir Desa Sungsang ini, tidak berbeda jauh dengan kondisi masyarakat di perkotaan. Kenakalan remaja juga tidak susah untuk ditemukan di desa ini. Seperti mabuk-mabukan, perjudian bahkan sampai dengan narkoba tidak begitu sulit ditemukan di desa Sungsang. Kenakalan-kenakalan diatas akan sangat mudah kita temui, bahkan di pinggiran jalan ketika menyusuri sepanjang jalan desa.

Ketika musim panen tiba, atau ketika nelayan pulang melaut dan menjual hasil tangkapannya bisa dikatakan membawa hasil berupa uang dalam jumlah yang lumayan besar. Sehingga ketika mereka pulang ke darat mereka bisa membelanjakan uangnya untuk apa saja yang mereka mau. Dan tidak jarang juga mereka membelanjakan untuk keperluan yang bersifat negatif seperti minuman keras, judi dan bahkan narkoba.



Banyak terjadinya perkelahian di kalangan remaja dan pemuda juga diakibatkan oleh pengaruh minuman keras dan narkoba. Hanya karena senggolan bahu saja mereka sudah berkelahi dan memakai senjata tajam.

2. Cara Penyelesaian Konflik

Konflik juga mempunyai fungsi apabila dalam penyelesaian dan penanganannya melalui metode-metode yang tepat. Penanganan konflik biasanya tergantung skala besarnya konflik tersebut, jika konflik hanya berhubungan dengan kesalah pahaman antara bos nelayan dengan anak buahnya biasanya konflik tersebut diselesaikan melalui jalur musyawarah yang dimotori oleh tokoh masyarakat maupun pihak aparatur desa seperti ketua RT maupun kepala desa. Jika konflik berskala besar dan membutuhkan surat-surat penting, contohnya seperti konflik ditabraknya kapal nelayan oleh kapal tongkang, maka pihak yang dapat membantu yaitu kepala desa dan syahbandar serta pihak berwenang lainnya.

a. Diselesaikan secara Pribadi

Terjadinya konflik di kalangan nelayan selama ini mayoritas diselesaikan secara pribadi melalui jalur musyawarah dan kekeluargaan. Peran pemerintah jarang sekali terlihat disini. Kebanyakan nelayan memilih menyelesaikan konflik melalui cara musawarah antar nelayan yang berkonflik tersebut. Ketika kerugian yang ditimbulkan dibayar, maka konflik segera berakhir. Tidak perlu berbuntut panjang sampai kepada pihak berwenang. Karen abgai nelayan, akan membutuhkan waktu yang panjang.

Sementara mereka sendiri membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk bekerja mengarungi lautan.

b. Pemerintah Desa

Pihak yang menangani konflik selanjutnya yaitu kepala desa. Kepala desa juga berperan dalam menyelesaikan konflik yang berhubungan dengan masyarakatnya dengan cara mengeluarkan surat-surat yang diperlukan nelayan yang ditabrak tersebut. Untuk konflik seperti diatas memang jarang terjadi, terjadi mungkin bisa satu tahun satu kali kasus.

Untuk kasus-kasus yang lainnya juga ketika tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah atau melalui pendekatan pribadi, maka kasus-kasus tersebut akan dimediasi oleh pihak pemerintahan desa. Walaupun pada kenyataannya pemerintah desa seolah-olah agak acuh dengan konflik yang terjadi antara nelayan dengan nelayan *trawl*.

Pemerintah desa malah terkesan tidak terlalu berperan dalam penyelesaian konflik tersebut, walaupun memang masih ada perannya. Pemerintah / dinas terkait bahkan terlihat seperti membiarkan saja. Sebelumnya pernah ada tatap muka antara pemerintah desa dengan nelayan yang menuntut pembatasan dan penghentian kegiatan *illegal fishing* menggunakan *trawl* tersebut. Tetapi sampai saat ini tidak ada jalan keluarnya. Nelayan selalu dijanjikan waktu saja dalam penyelesaiannya, tetapi tidak pernah ada realisasinya.

Kasus kapal *trawl* ini sudah ada sekitar 2 tahun belakangan ini. Untuk membedakan itu kapal *trawl* dengan kapal nelayan biasa, biasanya ada bendera khusus. Ketika ada patroli maka tidak akan ditangkap oleh petugas patroli. Ini terjadi karena adanya kerjasama antara oknum petugas dengan pemilik kapal *trawl*. Pemilik kapal cukup membayar Rp.700.000 per bulan ke perusahaan tertentu. Ketika ada razia kemudian tertangkap pun, maka akan segera dibebaskan. Jadi, razia itu seolah-olah hanya sekedar seremonial saja. Sekarang ini kasus-kasus *trawl* yang dinyatakan sebagai alat tangkap *illegal* nyatanya dilindungi oleh oknum-oknum petugas. Sehingga tidak ada tindak tegas yang nyata dari pemerintah. Bahkan parkir kapal *trawl* sekarang ini sudah terang-terangan. Tidak ada yang berani mengusik keberadaan kapal-kapal tersebut. Padahal dengan adanya kapal-kapal *trawl* tersebut, hasil tangkapan nelayan jauh lebih berkurang dibanding sebelum adanya kapal-kapal *trawl* tersebut.

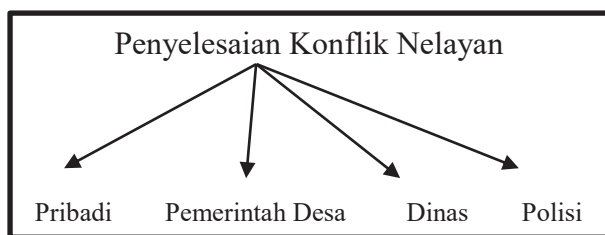
c. Peran Pemerintahan / Dinas Terkait

Peran pemerintah atau dinas di Sungsang ini cukup baik, walaupun ada juga dinas melanggar aturan yang mereka buat sendiri, seperti kasus perjudian yang semakin marak di Desa Sungsang. Mereka yang seharusnya menjadi pelopor penegak hukum, justru mereka juga pihak pertama melanggar aturan yang memang telah dilarang.

Kemudian juga pernah kejadian konflik kapal *trawl* bahkan sampai dibawa ke pemerintah pusat. Tetapi ketika akan diselesaikan oleh pemerintah pusat melalui dinas terkait, dan mereka melakukan investigasi ke Sungsang. Kapal-kapal *trawl* yang masih tersisa tidak beroperasi. Sehingga laporan dari masyarakat dianggap oleh pemerintah pusat sebagai laporan palsu dan mengada-ada. Dimana berakhir dengan ketidakpercayaan dari pemerintah pusat kepada nelayan Sungsang.

d. Kepolisian

Kepolisian menjadi pihak penyelesaian terakhir yang dilakukan apabila kasus-kasus atau konflik nelayan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah melalui jalur pribadi maupun mediasi pihak pemerintah desa. Untuk konflik yang diselesaikan melalui pihak kepolisian ini sangat jarang terjadi. Penyelesaian-penyelesaian yang pernah terjadi selama ini juga diselesaikan sendiri-sendiri. Jika ada alat tangkap nelayan yang rusak akibat kapal dari nelayan yang lain, maka cukup diganti saja kerusakan itu dan masalah jadi selesai.



Penutup

Dalam tipologi kehidupan masyarakat nelayan di Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Sumatera selatan, tidak berbeda jauh dengan masyarakat nelayan di daerah lainnya. Konflik sosial di dalam struktur sosial masyarakatnya juga masih bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Konflik sosial yang terjadi juga masih diseputaran sumber pemenuhan kebutuhan.

Terdapat 4 jenis kategori konflik yang dijumpai pada masyarakat nelayan di Desa Sungsang. Antara lain konflik karena alat tangkap ikan yang tidak saling menguntungkan, tumpang tindih lokasi penangkapan, pengrusakan alat tangkap dan kenakalan remaja. Kenakalan remaja memang sedikit agak lucu ketika dihubungkan dengan konflik di daerah nelayan. Tetapi, temuan di lapangan mengungkapkan bahwa kenakalan remaja juga terjadi akibat dari hasil tangkapan nelayan. Kebanyakan remaja-remaja di Sungsang memilih untuk melaut, kemudian hasil laut berupa uang itu dipergunakan sebagai modal untuk membeli narkoba, minum-minuman keras, judi dan lain sebagainya.

Dalam penyelesaian konflik di desa Sungsang, berbagai pihak juga terlibat. Jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat antar pribadi, maka akan dilanjutkan dengan mediasi oleh pihak pemerintah desa. Jika tidak, maka bisa berlanjut ke pihak berwenang seperti dinas terkait dan bahkan kepolisian.

Daftar Bacaan

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Charles A.T. 2001. *Fishery Conflict and the Co-management Approach*. Di dalam: Tony J. Pitcher, editor. *Sustainable Fishery Systems*. Canada: University of British Columbia.
- Fisher, Simon et al., *Mengelola konflik: ketrampilan & strategi untuk bertindak*, Jakarta [etc.: Zed Books ; British Council ; Responding to Conflict (RTC), 2001.
- Kinseng, Rilus A., *Konflik nelayan*, 2014.
- Kusnadi, *Akar kemiskinan nelayan*, Yogyakarta: LKiS : Distribusi, LKiS Yogyakarta, 2003.
- Satria, Arif, *Konflik Nelayan Pasca Otonomi Daerah.*, Kagoshima: in press, 2003.
- . 2006. *Konflik Nelayan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. [Paper]. Disampaikan pada Forum Koordinasi Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan, DKP, Manado, 7-9 Desember 2006.
- Sulaiman. 2013. *Model Penyelesaian Konflik Alat Tangkap Perikanan di Aceh Barat*. *Jurnal Ilmu Hukum* No. 59, Th. XV (April, 2013), pp. 99-113.

Suseno, Frans Magnis, *Pemikiran Karl Marx "Sosialisme Utopis Keaperselisihan Revisionism"*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Widiarto, Aan Eko. Setiawan Nurdayasakti dan Faizin Sulistio. 2013. *Mekanisme Penyelesaian Konflik Nelayan*. Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 2.

Sumber Lain

Keppres Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pelarangan *Trawl*.

